

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Beniharmoni, Prasetyo, H., Bakhtiar, H., Palayukan, M., Irwannsyah, Nugraha, A., Lasia, S., Abadi, F., Hasibuan, S., Wahyuningsih, Y., & Ramadhani, D. (2022). *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19*. Deepublish.
- Burlian, P. (2016). *Patologi Sosial* (Cetakan pertama). PT Bumi Aksara.
- Effrianto, P., Yuliansyah, Putro, S., Rizkiah, F., & Hidayah, F. (2015). *Kiat-kiat Terhindar Dari korupsi Hibah dan Bansos*. Jakarta: Smart.
- Efritadewi, A. (2020). *Modul Hukum Pidana* (Kesatu). UMRAH Press.
- Manan, A. (2018). *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (Cetakan ke-5). Kencana.
<http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/6413>
- Manan, B., & Harijanti, S. (2014). *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Rajawali Pers.
- Marbun, R., Yuherawan, B. S. D., & Mulyadi, M. (2021). *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana: Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana* (Cetakan Pertama). PT. Publica Indonesia Utama.
- Margono. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika.

- Marzuki, S., Jayus, A. J., & Wijayanto, D. (2014). *Disparitas Putusan hakim : "Identifikasi dan implikasi"*. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Pangestu, M., Maarif, A., & Kasali, R. (2017). *Ahok Through Their Eyes: Ahok di Mata Mereka*. Basuki Solusi Konsultindo.
- Priyatno, D. (2017). *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Indonesia*. Prenadamedia Grup.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (Kelima)*. Refika Aditama.
- Sholahudin, U. (2017). *Keadilan, Demokrasi, dan Korupsi (Esai-esai tentang Perilaku Elit Daerah dan Lemahnya Penegakan Hukum)*. Intrans Publishing.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Kesepuluh)*. Rajawali Pers.
- Surachim dan Suhandi. (2011). *Strategi dan Teknik Korupsi (Pertama)*. Sinar Grafika.
- Susanti, I. D. (2021). *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode (Cetakan Pertama)*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Syarifuddin. (2020). *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 (Kesatu)*. Kencana.

Warjiyati, S. (2018). *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum* (Cetakan ke-1). Prenadamedia Group.
<http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/1300/>

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok kepegawaian

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2020 Tentang Penjelasan Pasal 2 dan 3 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional

C. Jurnal

Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif.

Undang: Jurnal Hukum, 2(1), 169–192.

<https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>

Juanda, E. (2017). Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum. *Jurnal*

Ilmiah Galuh Justisi, 4(2), 168. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322>

Juhaeni, J. (2021). Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik dalam

Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Konstituen*, 3(1).

<https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/2386>

Kristina, M. (2021). Tipologi Penindakan Kejahatan Korporasi Dalam Korupsi

Bantuan Pandemi Covid-19. *Jurnal Yustika*, 24. No. 1. 2021.

Malian, S. (2020). Penyalahgunaan Wewenang Jabatan oleh Pejabat

Negara/Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi Negara dan

Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Respublica*, 20(1), 102–121.

<https://doi.org/10.31849/respublica.v20i1.5363>

Muabezi, Z. A. (2017). Negara Berdasarkan Hukum (rechtsstaats) Bukan

Kekuasaan (Machtsstaat) – Rule of Law and Not Powerstate. *Jurnal*

Hukum dan Peradilan, 6(3), 421.

<https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>

Mufida, S., Timur, F. G. C., & Waluyo, S. D. (2020). Strategi Pemerintah

Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif

- Ekonomi. *Jurnal Independen Politik Indonesia dan global*, 1(2), 10.
<https://doi.org/10.24853/independen.1.2.121-130>
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83–104. <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>
- Nuryanto, C. (2018). Penegakan Hukum Oleh Hakim dalam Putusannya antara Kepastian Hukum dan Keadilan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1).
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2585/1941>
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1).
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995>
- Saribu, Y. (2018). Tinjauan Konstitusional Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Tentang Persamaan Kedudukan di Depan Hukum pada Proses Penangkapan Bagi Seseorang yang di duga melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Lex Administratum*, 6(1).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/20332/19937>
- Tama, Bahran, Mouna, Tri, & Asram. (2014). Studi Atas Disparitas Putusan Pidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Indonesia Corruption Watch*.

Wijaya, E. K. (2021). Tinjauan Yuridis Mengenai Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Eks Menteri Sosial Juliari. *Kegiatan Riset dan Debat Universitas Diponegoro*, 7.

D. Sumber Lainnya

Alim, H. (2016, September 30). *Sanksi Sosial untuk Koruptor*.
<https://mediaindonesia.com/opini/69503/sanksi-sosial-untuk-koruptor>

Asshiddiqie, J. (2017). Gagasan Negara Hukum Indonesia. *Artikel Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas 1B*.

Atiqah, D. (2020). *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan*. https://papurwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan#_ftn3

Badan Pusat Statistik (BPS). (2020, Januari 15). Presentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik Menjadi 9,78 persen. *Badan Pusat Statistik*.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>

BBC News Indo. (2021, 08). *Vonis Juliari Batubara: Diringankan karena cacian publik, “keberpihakan hakim untuk pelaku atau korban pandemi?”* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58320105>

- Guritno, T. (2021, Juli 28). *Kasus Korupsi Bansos, Juliari Juga Dituntut Ganti Kerugian Negara Rp 14,597 Miliar*.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/07/28/14595661/kasus-korupsi-bansos-juliari-juga-dituntut-ganti-kerugian-negara-rp-14597>
- Persada, S. (2020, Desember 6). *Ini Isi Paket Bansos Covid-19 yang Jadi Bancakan Mensos dan Anak Buahnya*.
<https://nasional.tempo.co/read/1411971/ini-isi-paket-bansos-covid-19-yang-jadi-bancakan-mensos-dan-anak-buahnya>
- Rachmawati. (2021, Juli 27). *Kisah Warga yang Tidak Dapat Bansos Saat PPKM Darurat, Tak Didata hingga Bingung untuk Biaya Makan*.
<https://regional.kompas.com/read/2021/07/27/153500378/kisah-warga-yang-tidak-dapat-bansos-saat-ppkm-darurat-tak-didata-hingga?page=all>
- Secha Nur, K. (2021, Agustus 9). *Warga Tambora Jakbar Keluhkan Kualitas Beras Bansos: Banyak Kutu-Kerikil*. <https://news.detik.com/berita/d-5676041/warga-tambora-jakbar-keluhkan-kualitas-beras-bansos-banyak-kutu-kerikil>
- Tim Hukumonline. (2022, September 27). *6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/?page=2>